

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan terkait diplomasi Indonesia terhadap China dalam kerjasama alih teknologi rudal C-705 guna mendukung kemandirian alutsista dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

- Salah satu wujud pembangunan kemandirian alutsista melalui industri pertahanan dalam negeri adalah adanya kerjasama pelaksanaan alih teknologi rudal C-705 dengan China sebagai sarana untuk mendukung pembangunan rudal nasional. Namun pada pelaksanaannya, tidak sedikit kendala-kendala yang kemudian menghambat pelaksanaan kerjasama ini. Adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat bertujuan untuk mempromosikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dengan membentuk level koordinasi terkait pelaksanaan diplomasi secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima prinsip *mutistakeholder diplomacy* yang ada, prinsip kolaborasi, dialog dan inklusi telah dilaksanakan dengan baik. Namun, prinsip konsultasi dan *muidimensional support* belum dilakukan dengan maksimal sehingga menyebabkan munculnya kendala-kendala yang menghambat tercapainya kesepakatan ToT seperti ketidakpercayaan antar user dan industry pertahanan yang mempengaruhi kesiapan penerima teknologi itu sendiri. Pelaksanaan koordinasi yang kurang baik antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya kesepakatan ini.
- Hasil penelitian mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan kerjasama dengan menggunakan konsep *prisoner's dilemma* dengan pertimbangan kepentingan nasional, ancaman dan kekuatan menunjukkan kemungkinan kedua negara untuk saling bekerjasama lebih besar dibanding tiga kemungkinan lainnya. Besarnya kemungkinan untuk saling

bekerjasama ini merupakan hasil yang cukup baik dari penguatan diplomasi pertahanan melalui peningkatan CBM, *capacity building* dan *defense industry* yang telah terkonfirmasi dengan data yang ada. Namun pada kenyataannya, penguatan diplomasi pertahanan diatas belum mampu untuk menjadi dorongan kuat dalam tercapainya kesepakatan ini. Sedangkan, diplomasi pertahanan dalam sektor lain seperti ekonomi dan militer belum dilakukan dengan maksimal.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai diplomasi pertahanan yang dapat diupayakan dalam bidang lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam rangka mendorong tercapainya sebuah kesepakatan kerjasama. Sehingga, diperlukan penelitian lanjutan yang dapat menjelaskan keterkaitan diplomasi pertahanan dengan upaya-upaya di sektor lain selain pertahanan selama tujuannya untuk mendukung pengembangan pertahanan. Disamping itu, untuk menguji teori-teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini juga dapat diaplikasikan pada studi kasus lain.

### 5.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk pemangku kepentingan terkait dalam mendorong tercapainya kesepakatan alih teknologi rudal C-705 untuk mendukung kemandirian pembangunan rudal nasional, yang dijelaskan sebagai berikut;

- Sebelum membicarakan upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan pihak China, maka terlebih dahulu diperlukan adanya perbaikan implementasi kebijakan dan koordinasi antar *domestic stakeholder* dengan tujuan untuk meningkatkan *mutual trust* antar masing-masing stakeholder tersebut guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin dapat terjadi dalam upaya diplomasi yang hendak dilakukan. Hal

ini ditujukan terutama antara pihak user dan industry pertahanan dengan monitoring yang dilakukan oleh Kementrian Pertahanan

- Diplomat-diplomat generalis yang dimiliki Kemlu kurang dapat membantu Kemhan dalam penyusunan strategi diplomasi yang lebih teknis yaitu dalam bidang pertahanan. Maka dari itu, Kemhan perlu memiliki inisiasi untuk melakukan pengembangan SDM sebagai garda depan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan dengan negara lain

- Lemahnya bargaining position Indonesia di mata negara partner menjadi salah satu hambatan tercapainya kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan. Sehingga diperlukan adanya penguatan bargaining position Indonesia melalui kerjasama dalam bidang selain pertahanan seperti dalam sektor politik dan ekonomi